

Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar

Tasyah Sempurna Br. Hombing¹, Siti Hazzah Nur. R^{*2}

^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20222, Indonesia

*Corresponding Author: sitihazhah@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: November 30th, 2025

Revised: December 11st, 2025

Production: December 24nd, 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana/>

E-ISSN: 3090-885X

ABSTRACT

The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) plays a strategic role in coordinating the regional development planning process, especially in the era of regional autonomy which emphasizes a participatory approach. This research was conducted to analyze the participatory development planning process by the BAPPEDA of Pematang Siantar City in Parhorasan Nauli Village. The research focuses on the extent to which BAPPEDA is able to involve the community, coordinate across sectors, and realize inclusive and sustainable planning. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation of BAPPEDA officials, community leaders, the Community Empowerment Institute (LPM), and other stakeholders. The results show that the participatory development planning process by BAPPEDA of Pematang Siantar City has been running through the Musrenbang mechanism, but it is not yet fully optimal. Participation is still characterized by mobilization, lack of feedback, and there is still technocratic dominance of BAPPEDA in final decision-making, as well as cross-sectoral coordination that needs improvement.

Keyword: Participatory Planning, BAPPEDA, Musrenbang, Regional Development, Pematang Siantar

ABSTRAK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan di daerah, khususnya pada era otonomi daerah yang menekankan pendekatan partisipatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan partisipatif oleh BAPPEDA Kota Pematang Siantar di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana BAPPEDA mampu melibatkan masyarakat, mengoordinasikan lintas sektor, serta mewujudkan perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur BAPPEDA, tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan partisipatif oleh BAPPEDA Kota Pematang Siantar telah berjalan melalui mekanisme Musrenbang, namun belum sepenuhnya optimal. Partisipasi masih bersifat mobilisasi, kurangnya umpan balik, dan masih ada dominasi teknokratis BAPPEDA dalam pengambilan keputusan akhir, serta koordinasi lintas-sektor yang perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, BAPPEDA, Musrenbang, Pembangunan Daerah, Pematang Siantar



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan karakteristik spesifik wilayah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi, paradigma pembangunan bergeser dari pendekatan top-down (sentralistik) menuju pendekatan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi krusial untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput.

Dalam kerangka ini, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi sangat strategis dan krusial. BAPPEDA adalah institusi teknokratik dan koordinatif yang bertanggung jawab menyusun dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Fungsi strategis BAPPEDA meliputi penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang realistis, serta menjamin konsistensi substansi perencanaan lintas sektor. Selain itu, BAPPEDA berperan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memfasilitasi instrumen perencanaan partisipatif, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui Musrenbang yang berjenjang (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota), BAPPEDA berfungsi menjaring aspirasi masyarakat (bottom-up) dan menyelaraskannya dengan kebijakan daerah (top-down). Oleh karena itu, BAPPEDA tidak hanya menjadi perencana teknis, tetapi juga fasilitator demokrasi pembangunan di tingkat daerah.

Meskipun BAPPEDA Kota Pematang Siantar secara formal telah menyediakan wadah partisipasi melalui Musrenbang, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keterlibatan masyarakat. Tantangan utama adalah belum optimalnya koordinasi antar-perangkat daerah (OPD) teknis, yang menyebabkan beberapa usulan masyarakat dari Musrenbang belum sepenuhnya terserap dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Studi kasus di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, menyoroti kesenjangan signifikan antara harapan masyarakat dan realisasi program. Hasil Musrenbang menunjukkan bahwa usulan yang terakomodasi didominasi oleh bidang infrastruktur seperti pembangunan drainase dan peningkatan jalan lingkungan. Namun, masyarakat Kelurahan Parhorasan Nauli masih menantikan terealisasinya seluruh usulan yang diajukan, karena terdapat 47 usulan yang tidak diakomodasi akibat keterbatasan anggaran dan perbedaan prioritas. Usulan yang belum

terakomodasi ini mencakup program kritis seperti peningkatan jalan rusak parah (Jalan Bandar Gang Selamat dan Jalan Masjid Al Akbar 2), normalisasi kali untuk penanganan banjir, serta usulan di bidang sosial budaya seperti pelatihan UMKM dan pengadaan sarana Posyandu. Kondisi ini diperburuk oleh tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dan cenderung formalitas. Survei awal menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Kelurahan Parhorasan Nauli tidak memahami kegiatan Musrenbang. Keadaan ini menimbulkan kekecewaan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses perencanaan. Masyarakat menyadari bahwa perencanaan pembangunan yang efektif membutuhkan partisipasi aktif, namun faktor internal (kesadaran dan pengetahuan warga) dan faktor eksternal (respon stakeholder) masih menjadi penghambat.

Dalam arsitektur perencanaan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memegang peran sentral sebagai "konduktor". BAPPEDA tidak hanya bertanggung jawab secara teknis menyusun dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD), tetapi juga bertugas mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinkronkan usulan bottom-up dari masyarakat dengan prioritas top-down dari pemerintah daerah dan pusat. Keberhasilan perencanaan partisipatif sangat bergantung pada kemampuan BAPPEDA dalam menjalankan peran fasilitasi dan koordinasi ini. Namun, dalam praktiknya, proses partisipatif sering menghadapi tantangan. Partisipasi kerap bersifat seremonial, di mana masyarakat hanya hadir untuk melegitimasi rencana yang sudah disusun secara teknokratis oleh BAPPEDA dan OPD. Banyak usulan masyarakat dari Musrenbang tingkat bawah "hilang" dalam perjalanan ke tingkat kota tanpa ada umpan balik yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana BAPPEDA Kota Pematang Siantar menjalankan fungsinya dalam proses perencanaan partisipatif, dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara komprehensif dinamika partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas perencanaan pembangunan. Penelitian dilaksanakan di BAPPEDA Kota Pematang Siantar dan Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut menunjukkan dinamika perencanaan pembangunan dan tingkat partisipasi masyarakat yang relevan untuk dikaji secara mendalam. BAPPEDA dipilih sebagai objek utama penelitian karena memiliki

peran strategis dalam perumusan kebijakan dan koordinasi partisipasi masyarakat sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan partisipatif, observasi terhadap aktivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan lingkungan kerja. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan tahunan BAPPEDA, data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematang Siantar, serta dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan tingkat pengetahuan dan pengalaman informan terhadap pelaksanaan pembangunan partisipatif. Informan terdiri atas informan kunci, yaitu Kepala BAPPEDA Kota Pematang Siantar; informan utama yang meliputi Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana BAPPEDA, Lurah, dan Ketua LPM; serta informan pendukung, yaitu Ketua RW, tokoh masyarakat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, dan masyarakat Kelurahan Parhorasan Nauli. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan mengelompokkan temuan ke dalam kategori dan pola berdasarkan kerangka kinerja Miller (*Input, Process, Output, Outcome, dan Benefit*). Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mengonfirmasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara kualitatif, BAPPEDA Kota Pematang Siantar memiliki fondasi sumber daya manusia yang cukup baik. Pegawai ASN di BAPPEDA menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, dengan 52.27% berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan 27.27% berlatar belakang Magister (S2). Tingkat pendidikan ini merupakan modal penting dalam menjalankan tugas analisis kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan. Kepala BAPPEDA mengonfirmasi bahwa kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas telah sangat baik, didukung oleh pelatihan teknis (diklat) yang diselenggarakan secara rutin, yang mencakup teknik perencanaan dan penggunaan aplikasi sistem informasi pembangunan.

3.2 *Manajemen Anggaran dan Efisiensi*

Kinerja input dari aspek anggaran menunjukkan serapan yang sangat tinggi untuk kegiatan perencanaan partisipatif. Data menunjukkan realisasi anggaran untuk pelaksanaan Musrenbang Kota Pematang Siantar mencapai Rp304.857.900 pada tahun 2021, dengan rasio realisasi mencapai 93.18%. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD juga mencapai rasio realisasi hingga 99.03%.

Tingginya realisasi anggaran ini menunjukkan Akuntabilitas Administratif yang baik (dana digunakan sesuai alokasi). Namun, tingginya serapan dana untuk pelaksanaan Musrenbang tidak serta-merta menjamin keberhasilan program. Temuan ini mengindikasikan adanya Ilusi Akuntabilitas Fiskal, di mana dana terserap untuk memenuhi prosedur formal (seperti konsumsi, ATK, honor narasumber), tetapi alokasi tersebut belum efisien dalam menjamin kualitas outcome, yaitu terpenuhinya kebutuhan riil masyarakat dan terbangunnya kepercayaan publik. Apabila dana yang besar hanya menghasilkan partisipasi yang bersifat formalitas, maka efektivitas alokasi anggaran perencanaan pembangunan perlu dipertanyakan.

3.3 *Sarana Prasarana dan Transparansi (SIPD)*

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi dan efisiensi, BAPPEDA Kota Pematang Siantar telah mengadopsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini secara ideal berfungsi sebagai alat transparansi untuk memberikan akses kepada publik terhadap dokumen perencanaan, anggaran, dan status usulan dari Musrenbang. Namun, implementasi sistem ini belum optimal sebagai alat transparansi publik. Akses informasi bagi masyarakat umum masih terbatas setelah proses perencanaan "dikunci". Banyak masyarakat di Kelurahan Parhorasan Nauli yang tidak mengetahui adanya sistem tersebut atau merasa kesulitan mengakses informasi mengenai nasib usulan mereka.

Kondisi ini menunjukkan adanya Kegagalan Transparansi Digital yang kontras dengan prinsip Tata Kelola Publik. Ketersediaan teknologi (SIPD) tidak diimbangi dengan upaya sosialisasi yang masif dan inklusif (misalnya, melalui spanduk, banner, atau media lokal). Akibatnya, muncul persepsi negatif di masyarakat bahwa penentuan skala prioritas pembangunan bersifat subjektif atau dipengaruhi elite, karena proses seleksi usulan yang didasarkan pada skoring BAPPEDA tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Kegagalan ini memperlebar jurang informasi antara pemerintah dan masyarakat, mengikis kepercayaan yang seharusnya dibangun melalui proses partisipatif.

3.4 *Akomodasi Usulan Masyarakat*

Output yang paling krusial adalah tingkat akomodasi usulan masyarakat. BAPPEDA menerima total 138 usulan dari Kelurahan Parhorasan Nauli yang dibawa ke Musrenbang Kecamatan.

Tabel 3.1: Rekapitulasi Usulan Musrenbang Kelurahan Parhorasan Nauli (Estimasi Kuantitatif)

Status Usulan		Jumlah Kuantitatif	Persentase	Jenis Usulan Dominan yang Diakomodasi
Usulan (Kelurahan)	Total	138 usulan	100%	Infrastruktur (Drainase, Jalan), Sosial, Ekonomi
Terakomodasi dalam RKPD		91 usulan	65.9%	Pembangunan Saluran Drainase (34 item), Peningkatan Jalan Lingkungan (22 item)
Belum Terakomodasi		47 usulan	34.1%	Perbaikan Jalan Rusak Parah, Pelatihan UMKM, Pengadaan Sarana Posyandu

Sumber: *Peneliti*, 2025

Data ini memperlihatkan adanya Bias Infrastruktur vs Kesejahteraan dalam output BAPPEDA. Mayoritas usulan yang diakomodasi (91 usulan) adalah pembangunan fisik, terutama di bidang drainase dan perbaikan jalan lingkungan. Meskipun usulan fisik penting, terdapat 47 usulan yang belum terakomodasi, termasuk program pemberdayaan ekonomi (pelatihan UMKM, tempat produk masyarakat) dan peningkatan sarana sosial (Posyandu), serta perbaikan jalan yang volumenya kecil namun kerusakannya parah.

Penolakan usulan sosial-ekonomi menunjukkan bahwa output yang dihasilkan masih didominasi oleh prioritas OPD teknis dan proyek yang secara fisik lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan hanya pada pembangunan fisik semata. Selain itu, penolakan didasarkan pada keterbatasan anggaran dan ketidaksesuaian dengan skala prioritas *top-down* yang mungkin lebih mempertimbangkan potensi strategis daerah ketimbang kebutuhan mendesak warga.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan Analisis kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pematang Siantar dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, menunjukkan adanya dikotomi antara kepatuhan administratif dan efektivitas hasil (outcome). Optimalisasi Input dan Proses Formal: BAPPEDA telah mencapai optimalisasi pada indikator Input dan Process formal. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan SDM yang berkualifikasi tinggi, rasio serapan anggaran Musrenbang yang mencapai 93.18% hingga 99.03% (Akuntabilitas Administratif), dan kepatuhan terhadap tahapan perencanaan regulasi (UU No. 25/2004). Kesenjangan Tata Kelola pada Process Substantif dan Outcomenya mengenai kualitas partisipasi masyarakat berada pada tingkat Tokenisme (Arnstein), di mana usulan masyarakat

diterima (Output: 91 dari 138 usulan terakomodasi) tetapi masyarakat tidak memiliki kontrol atas penentuan prioritas akhir. Kesenjangan ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi horizontal BAPPEDA dengan OPD teknis (Akuntabilitas Horizontal yang rendah), yang mengakibatkan rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kritis masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak parah dan penanganan banjir.

Kegagalan Transparansi Pasca-Keputusan: Meskipun sistem SIPD tersedia, kegagalan dalam menyosialisasikan hasil dan status usulan secara terbuka dan real-time memperkuat persepsi publik bahwa proses perencanaan didominasi oleh kepentingan top-down atau politis, sehingga merusak prinsip Transparansi dan memicu apatisme warga. Secara keseluruhan, kinerja BAPPEDA telah memenuhi fungsi perencanaan publik sesuai kerangka manajemen sektor publik, namun efektivitas dan keberlanjutannya masih bergantung pada penguatan kualitas proses Musrenbang agar melampaui formalitas, serta peningkatan koordinasi dan transparansi pasca-penetapan prioritas. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan temuan, direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BAPPEDA dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif: 1. Reorientasi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur: BAPPEDA perlu mengubah fokus pelatihan (diklat) aparatur perencana dari sekadar keterampilan teknokratis (penyusunan dokumen) menjadi soft skills fasilitasi partisipatif, mediasi konflik kepentingan, dan keterampilan komunikasi publik. Peningkatan kapasitas ini harus menyasar staf fungsional perencana agar mereka mampu menjadi translator yang efektif antara aspirasi bottom-up dan kebijakan top-down.

Penguatan Akuntabilitas Horizontal dan Monitoring Realisasi: BAPPEDA wajib memperkuat peran koordinatifnya dengan OPD teknis (khususnya Dinas PU) dengan menetapkan mekanisme Akuntabilitas Horizontal yang ketat. Ini mencakup: Penyusunan nota kesepahaman (MoU) pasca-Musrenbang yang mengikat OPD untuk menindaklanjuti usulan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penerapan sistem monitoring khusus untuk melacak usulan masyarakat yang masuk ke dalam RKPD, sehingga keterlambatan realisasi program kritis dapat diidentifikasi dan diatasi secara cepat, menghindari terulangnya kasus jalan rusak dan permasalahan sanitasi. Peningkatan Transparansi Informasi dan Umpan Balik Publik: Fungsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus dioptimalkan sebagai dashboard publik yang real-time dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

BAPPEDA harus proaktif memberikan umpan balik rinci kepada Lurah dan LPM (terutama di Kelurahan Parhorasan Nauli) mengenai status 47 usulan yang ditolak/ditunda, disertai alasan teknis yang logis dan terbuka. Sosialisasi informasi ini harus dilakukan melalui media manual (papan pengumuman/spanduk) dan digital, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami warga. Mendorong Partisipasi Sejati (Citizen Power): Untuk melampaui level Tokenisme, BAPPEDA perlu mendorong peran yang lebih besar kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok perempuan (PKK), dan pemuda (Karang Taruna) dalam tahap penentuan prioritas dan pengawasan program

pasca-implementasi. Pelaksanaan Musrenbang perlu dijadwalkan di luar jam kerja agar partisipasi masyarakat umum (termasuk pekerja informal) dapat lebih merata dan inklusif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abe Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta; Pustaka. Jogja Mandiri.
- Agus Dody Sugiarto. 2013. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo, Pendekatan Pembangunan Nguwongke Wong. IPGI
- Anthony, R., Vijay Govindarajan, 2005. Management Control System, Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista, Penerbit Salameb Empat, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan. Jakarta: Kedupatian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas
- Bintoro Tjokroamidjojo. (2014). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Fahmi Ahmada (2009). Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada BAPPEDA Pemerintah Kota Blitar).
- Friedman, John. (1987). Planning in The Public Domain (From Knowledge to. Action). Princeton University Pers. Glass
- Halim, A. (2014). Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Uu No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 2(2).
- Korten, David, C, 1988. Community Organization and Rural Development A Learning Process Approach, In Public Administration Review.76(2),351- 362.
- Mahsun, M. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Pertama). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Riyadi dan Bratakusumah Deddy Supriady. 2004. Perencanaan Pembangunan. Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia
- Siregar Kiki Hardiansyah (2020). Peranan Badan perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan.
- Sugiyono. 2018. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wicaksono Agus & Sugiarto Budi. 2005. Modul Studio Perencanaan Desa. Malang: PPSUB.

Yonasi Permai Sari.A. 2021. Optimalisasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Partisipatif Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kabupaten Barito Utara.